



Kemiskinan Atensi Pusat

KEPALA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi



Ahi

Kalbar Ahi menyatakan jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar telah melakukan pemeriksaan kinerja penanggulangan kemiskinan pada 2010

hingga 2014. Hasil pemeriksaan ini, menurut dia, menunjukkan adanya temuan yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

• ke halaman 15 kolom 5

Kemiskinan Atensi Pusat

sambungan dari halaman 9

“Temuan pertama, Pemprov Kalbar belum sepenuhnya memiliki database penduduk miskin yang *update*,” ujar Kepala Bappeda di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini. Ahi menuturkan, temuan lainnya yakni Pemprov juga belum memiliki data akurat mengenai informasi anggaran dan realisasi keuangan dalam program penanggulangan kemiskinan, yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Target penurunan tingkat kemiskinan di

daerah, diakui dia, juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan daerah. “Dalam hal ini adalah sumber daya finansial dan pemberdayaan nonfinansial, serta peta kemiskinan,” ungkap Ahi.

Temuan lainnya dari BPK RI Perwakilan Kalbar, diungkapkan dia, berupa program penanggulangan kemiskinan yang dipilih. Berdasarkan penilaian mereka, menurut dia, ternyata belum sepenuhnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target yang ditetapkan. Penanggulangan kemiskinan Kalbar, diakui

dia, juga belum sepenuhnya selaras dengan pemerintah pusat.

Ahi mengingatkan jika pemberantasan kemiskinan di Kalbar menjadi atensi dari Pemerintah Pusat. Tetapi, diingatkan dia kembali bahwa ada hal yang harus diperhatikan semua pihak, yakni angka kemiskinan Kalbar yang merupakan agregat atau pun merupakan kinerja dari kabupaten/kota.

“Kami berharap ini menjadi perhatian semuanya agar lebih fokus sebagaimana hasil temuan BPK RI,” katanya. (uni)